

TAHUN 2025

No	Judul Peraturan	Daftar Masukan	Risalah/Notulen	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029	a. Masukan Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. Masukan Ditjen Farmalkes c. Masukan Ditjen Pengendalian Penyakit d. Masukan Ditjen Kesehatan Lanjutan e. Masukan BKPK f. Masukan Ditjen Kesprimkom g. Masukan Kementerian/Lembaga (Bappenas, Kemenkeu, Setneg, Kemenkum, dll)	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan, PAK, atau harmonisasi
2	Permenkes Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Permenkes Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan	a. Masukan Ditjen Kesehatan Lanjutan b. masukan Ditjen Pengendalian Penyakit c. Masukan Kementerian/Lembaga (Kemenkeu, Kemenkum, Kemendagri)	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan atau harmonisasi

3	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Besaran, Persyaratan, dan tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan	a. Masukan Ditjen Pengendalian Penyakit b. Masukan Ditjen Kesehatan Primer c. Masukan Biro Keuangan	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan atau harmonisasi
4	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK,01,07/Menkes/923/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025	a. Masukan Biro Perencanaan b. Masukan Unit teknis terkait di lingkungan Kemenkes	Tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan

5	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK,01,07/Menkes/597/2025 tentang Nomenklatur Unit Organisasi dan Titelatur Jabatan dalam bahasa Inggris dan Penyingkatan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan	a. Masukan Paskas b. Masukan BKPK c. Masukan Biro OSDM	Tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
6	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK,01,07/Menkes/495/2025 tentang Standar Kompetensi jabatan Bagi Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pengawas pada Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan	Masukan Biro OSDM	Tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan

7	Kepsekjen Nomor HK.02.02/A/3380/2025 tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di lingkungan Kementerian Kesehatan	a. Masukan Biro Komunikasi b. Masukan SetItjen	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
8	Kepsekjen Nomor Hk.02.02/A/2965/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02,02/A/7578/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Iuran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat	Masukan PusBidkes Masukan Set.Itjen	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan

9	Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/51/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang Sejak Awal Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Masukan Biro Keuangan	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
10	Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/146/2025 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Mutasi Direktif oleh Pimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan	masukan Biro OSDM	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan

11	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/74 6/2025 Tentang Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Ahli Menteri Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	masukan berupa catatan/notes Menteri Kesehatan	tidak ada	notes
12	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/89 8/2025 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Pengelolaan Biaya Akomodasi, Uang Harian, Dan Transportasi Atas Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dilaksanakan Di Luar Kantor Kementerian Kesehatan	masukan Ka Passkas	tidak ada	masukan tertulis

13	KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/ XX /2025 TENTANG ORGANISASI PELAKSANA KANTOR PENGELOLA DONOR (DONORS OFFICE) KEMENTERIAN KESEHATAN	masukan berupa catatan/notes Menteri Kesehatan	tidak ada	notes
----	--	--	-----------	-------

14	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/492/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, Detasering/Secondment, Dan Pertukaran Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	catatan menteri	tidak ada	notes
----	--	-----------------	-----------	-------

15	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Terhadap Bab Pencatatan dan Pelaporan ketentuan lama dihapus agar tidak mengunci ketentuan tersebut Untuk Pelaporan dilakukan dua kali Pasal 8 Penerapan sanksi dapat menjelaskan norma yang dilanggar BAB III Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak mengatur Pendidikan Tinggi, perlu bridging lebih lanjut untuk mengetahui batasan mana yang di atur Kemenkes dan mana ranah Kemendikti pasal 317 terkait keseluruhan asn sudah diatur dengan PP di fasyankes pusat/daerah diberikan sesuai peraturan perundang-undangan, ini diatur untuk di fasyankes milik swasta. Sedangkan non asn dihapus/sudah diakomodir pencatatan pelaporan akan disederhanakan dan dituangkan dalam peraturan teknis	
----	---	--	--	--

TAHUN 2024

No	Judul Peraturan	Daftar Masukan	Risalah/Notulen	Keterangan
1	Permenkes Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan	a. Biro Perencanaan dan Anggaran b. Kementerian Sekretariat Negara c. Kementerian Hukum dan HAM d. Kementerian dalam Negera e. Unit teknis terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan, PAK, atau harmonisasi
2	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan	a. Biro OSDM b. KemenPAN/RB c. KemenkumHam	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan, PAK, atau harmonisasi
3	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2001/2024 tentang Pertunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025	a. Biro Perencanaan dan Anggaran b. Kementerian Dalam Negeri c. Unit teknis terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan, PAK, atau harmonisasi

4	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1800/2024 tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024	Biro Komunikasi	Tidak ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan, PAK, atau harmonisasi
5	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2014/2024 tentang Peta jabatan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan	Biro OSDM	tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
6	Kepmenkes Nomor HK.01.07/menkes/1638/2024 tentang Penetapan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai pengelola Pembayaran Bantuan Iuran Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kelompok Bukan Pekerja	Biro Keuangan dan Biro OSDM	Tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
7	Kepsekjen Nomor HK.02.02/A/3-74/2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024	a. Biro Perencanaan dan Anggaran b. Unit teknis terkait di lingkungan Kemenkes	Tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan

8	Kepsekjen Nomor HK.02.02/A/7578/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat	a. Biro Keuangan dan BMN b. Set.Itjen c. Paskas	Tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
9	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/3365/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Direktif Pimpinan atas Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2024	a. Biro OSDM b. Set.Itjen	Tidak ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
10	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/7427/2024 tentang Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji	a. Pusat Kesehatan Haji b. Ditjen Yankes c. Ditjen P2P	Tidak Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
11	Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/5582/2024 Tentang Mekanisme Penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	tidak ada	tidak ada	masukan tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan

12	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2024 Tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Masukan Ka Passkas	tidak ada	masukan tertulis
13	Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/6258/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/289/2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029	tidak ada	tidak ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
14	Kepmenkes Nomor Hk.01.07/Menkes/174/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas	Ditjen Yankes	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan

15	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ /2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/132/2025 Tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan	masukan Ka Passkas	tidak ada	masukan tertulis
----	--	--------------------	-----------	------------------

TAHUN 2023

No	Judul Peraturan	Daftar Masukan	Risalah/Notulen	Keterangan
1	Permenkes Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus	a. Ditjen Yankes b. Denas KEK c. kemenkumHam d. Setkab	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan, PAK, atau harmonisasi
2	Permenkes Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di fasilitas Pelayanan kesehatan	a. Ditjen Yankes b. kemenkumHam c. Setneg d. Setkab	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan, PAK, atau harmonisasi
3	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1432/2023 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pemulihan bagi Korban dan/atau Keluarga Korban Terdampak dari Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu	Ditjen Yankes	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan
4	Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama dalam rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	a. Ditjen Yankes b. Ditjen Nakes c. Paskas	Ada	masukan tersebut tidak hanya disampaikan secara tertulis namun bisa disampaikan secara langsung pada saat rapat pembahasan